



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
KE KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI SULAWESI 5 MARET 2019**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bogor ini adalah untuk melihat secara langsung mengenai program reforma agraria di Kabupaten Bogor, dimana Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi TAP MPR-RI No. IX/MPR/2001.

Direncanakan bahwa rombongan Komisi II DPR RI akan meninjau secara langsung perkembangan penyelesaian PTSL di Kabupaten Bogor. Mengingat pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL atau sertifikasi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bogor ini berjumlah 11 orang Anggota. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan TV Parlemen.

## **B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK**

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019. Pertemuan diselenggarakan di Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

## **C. HASIL KUNJUNGAN**

### **I. Sambutan Irjen Hubungan Hukum dan Keagrariaan ATR, BPN, Bapak Jamaluddin, SH, M. Hum,**

1. Yth bapak ketua Tim sekaligus wakil ketua Komisi II DPR RI beserta anggota komisi II DPR RI yang saya hormati,
2. Pertama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas kesempatan ini, dan kami sangat mengapresiasi atas kunjungan rombongan Komisi II DPR RI ke Kantor BPN Kab. Bogor. Kami atas nama Jajaran Kantor Kab Bogor mengucapkan selamat datang dan kami mengharapkan dapat melaksanakan harapan dan arahan dari bapak- ibu anggota komisi II DPR RI.
3. Sekali lagi, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam sambutan ini, dan kami berharap memperoleh arahan, saran dan masukan dari anggota komisi II DPR RI. Selamat datang, semoga arahan dan masukan yang diberikan dapat membuat kami bisa lebih baik lagi melayani masyarakat.
4. Saat ini Panja Pertanahan Komisi II DPR RI yang diketuai oleh Ketua rombongan, selain itu tentunya harapan kami dapat saran, kritik dan masukan dari rombongan, terkait dengan hasil yang sdh dicapai dalam PTSL

### **II. Sambutan Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bapak Dr. Ir. E. Herman Khaeron, MSi**

1. Terima kasih pada Wk. Bupati, terima kasih telah hadir di sini, meskipun kami mengevaluasi secara internal BPN , tetapi ada korelasinya dengan pemkab. Bogor.
2. Saya memperkenalkan anggota tim Komisi II DPR RI.
3. Tanah ini sangat penting bagi keutuhan negeri RI . dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 2, jelas menunjukkan bahwa pendiri negara kita memandang perlu menjaga keutuhan negeri ini.
4. UU PA no. 5 tahun 1960, secara keseluruhan menyatakan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan atas penguasaan dan pengelolaan tanah.
5. Di Komisi IV, jika dihubungkan dengan RUU Pertanahan, menjadi satu kesatuan yang utuh dan tak bisa dipisahkan, konservasi tanah dan air. Tanah bukan hanya diperuntukkan bagi penyediaan kebutuhan pangan yang menjamin hajat hidup bangsa ke depan.

6. Atas dasar konsitusi dan UU tersebut, lalu kita memudahkan penguasaan pada asing, menurut saya menjadi jauh sekali terhadap spirit dari UUD dan UUPA.
7. Yang ketiga, tentu program yang menjadi unggulan, adalah PTSL, kami ingin minta penjelasan terhadap segala sesuatu terkait dgn PTSL ini. Apa saja pertanyaannya mohon dijawab, karena kami ingin mendapatkan masukan untuk merumuskan kebijakan terkait dengna masalah pertanahan ini. Anggaran BPN untuk memberi laptop saja ditandatangani dan disetujui di Komisi II. Sehingga wajar jika kami ingin mendalami berbagi persoalan terutama terkait dengan PTSL
8. Meski masih ada anonym, karena taka da orangnya, maka nama bidang tanah yang tidak diketahui oemiliknya menggunakan nama pemilik di sampingnya, berbahaya dari perspektif hukum. Karena Jabar merupakan provinsi terbesar target PTSLnya, kami ingin mengetahui bagaimanapelaksanaannya, dukungan pemkab, dan bagaimana dukungan anggaran, lalu bagaimana jika bekerja overtime, apakah sdh dicover anggaran. Lalu bagaimana dengan ketersediaan SDM? Idealnya antara target capaian dgn SDM bagaimana? Mohon dijawab apa adanya. Terlebih karena sertifikat ini menjadi primadona bagi program pemerintah, meski ada yang melaporkan sertifikatnya harus dikembalikan, bayar ke oknum, dan capaian target PTSL, K1, K2, dan K3 maupun K4 dalam hal penanganan konflik pertanahan, hal ini semua harus kami ketahui karena kami juga akan melakukan evaluasi di triwulan pertama,
9. Waktu masih kuliah di IPB, saya masih sering berkunjung ke wilayah ini, yang sekarang jauh berkembang. Pusat kota mulai kelihatan. Di Kantah Bogor setiap hari ada 800 sampai 1000 pemohon.
10. Terkait dengan keberadaan ATR BPN perlu dimaknai juga sisi pelayanan publik. Evaluasi Pelayanan public juga masih merupakan lingkup di Komisi II. Kinerja hasil dari pelayanan publik bisa kami evaluasi melalui Ombudman. Sebagai institusi vertikal kami harus memberikan dukungan agar BPN dapat menjelma menjadi figure yang dapat dicontoh K/L lainnya. Bagaimana dengan kepastian hukum yang berlaku di Kab Bogor?
11. Pemkab Bogor merupakan mitra di Kemendagri, termasuk dalam hal penyaluran dana desa merupakan lingkup di Komisi II

### **III. Sambutan Wk Bupati Bogor**

1. Dalam mengelola wilayah Kabupaten Bogor seluas 298,6 ribu Ha, untuk menjaga asset daerah pemkab Bogor melakukan perjanjian dengan BPN Bogor untuk pendaftaran asset Pemkab Bogor. Pemkab Bogor telah menandatangani MoU dengan Kantah BPN Bogor tahun 2009-2013. MoU ini diperpanjang pada tahun 2014. Perpepanjangna kerja sama ini dilakukan dengna mempertimbangkan tingginya animo masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

2. Pemkab Bogor secara periodic melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah milik masyarakat, baik melalui Proda yang dibiayai APBD kab. Bogor, maupun melalui dukungan terhadap Program Nasional dan Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
3. Pemkab Bogor mendukung program PTSL di Kabupaten Bogor yang memiliki target 97.798 bidang lahan di 15 kecamatan pada tahun 2017 , 80 ribu bidang di 4 kecamatan pada tahun 2018, serta 75.000 bidang lahan di 7 kecamatan pada tahun 2019. Dukungan Pemkab bogor berupa mobil operasional dan dana hibah dengan perincian sbb:

Tahun	Dana Hibah
2017	<b>Rp. 1.314.000.000,-</b>
2018	<b>Rp. 5.000.000.000,-</b>
2019	<b>Rp. 5.212.000.000,-</b>

4. Selain itu Pemkab Bogor melaksanakan BPHTB online, sehingga masyarakat dapat mengakses dengna mudah. Pemkab Bogor saat ini sedang merumuskan kebijakan satu peta yang disebut dengan **BOGA PETA (BOGOR GEOSPASIAL MENUJU SATU PETA)**. Peta ini diharapkan menjadi bank data informasi dan perencanaan secara terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

#### **IV. Paparan Kakantah Bogor, Agustyansah**

1. Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat besar, kami memiliki keterbatasan SDM, idealnya Kantah Bogor memiliki tambahan 200-300 orang lagi, namun untuk dapat melaksanakan kegiatan PTSL, maka Pemkab Bogor membentuk Pokmas di desa2. Di 2018, Pemkab Bogor membantu hingga pelayanan kearsipan di BPN. tahun ini kami mengharapkan bantuan dari Pemkab adalah melacak keberadaan warkah dgn teknologi RFID.
2. PTSL 2017, 2018 memiliki perbedaan capaian karena perbedaan spesifik daerah. Pada 2017, kami melaksanakan program di Cibinong Raya, animo dan partisipasi warga sangat tinggi. Tanpa proses sosialisasi yang banyak, warga mencari tahu sendiri informasi PTSL ini. Sedangkan tahun 2018 di Jasinga, meskipun melalui kegiatan sosialisasi intensif, kesadaran warga masih rendah.
3. Mengenai juru ukur dukungan dari luar, tim smart PTSL, dan tim Meridian (PALAR).
4. Tidak ada kebijakan keringanan ataupun pembebasan BPHTB,
5. Kendala di lapangan, antusiasme warga kurang, pungli, taka da tanda batas bidang tanah, pemilik tanah tidak di tempat.
6. Penanganan kasus di Kabupaten Bogor:

- i. www. ATR Cibinong, untuk menangani pengaduan warga. Inovasi ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah pertanahan.
  - ii. Kantah Bogor sangat ingin menjadi contoh dalam pelayanan pertanahan, dengan target capaian 800-1000 per hari, tentunya hal ini memerlukan dukungan agar prosesnya dapat berjalan lancar. Warga yang datang sendiri, diberi stempel VIP. Kemudian untuk mengetahui prosesnya ia dapat mengecek secara online di web BPN kab Bogor.
  - iii. Kami sedang membuat digitalisasi arsip, dgn E warkah dan E Arsip agar dapat mengantisipasi kelambatan proses pencarian buku tanah. kami ingin mendapat dukungan, bahwa persakilan kantah di Cileungsi sangat penting untuk mengatasi masalah geografis
  - iv. Untuk desa yang lengkap setelah PTSL, akan dibangun layanan, klik, di sana tata ruangnya dapat. Semua bidang tanah dapat dilihat. sehingga semua bidang layanan berbasis IT
7. Untuk proses penanganan kasus pertanahan bermuara dari lambannya kami, sehingga kami bertekad untuk mencapai 0 tunggakan.

## V. Diskusi

### 1. Pak Herman, Demokrat

- a. 80 ribu ini target yang sangat besar, dan semuanya tercapai, tetapi sisa K3 hampir 50%. Jika target tahun 2019 ada target 75 ribu, berapa besar sisa target K3 dan K 4 di tahun sebelumnya bisa diselesaikan?
- b. Dari sisi anggaran, kami berterima kasih pada Bupati yang cukup besar memberikan hibah kepada Kantah BPN Bogor. Dari APBN, 20 M. dari target terhadap pelaksanaan PTSL yang 75 ribu, turun. Tetapi kalau melihat dari tujuan lokasi, naik menjadi 57 lokasi. Kemudian beban penyelesaian K3 dan K4 di tahun sebelumnya juga naik. Sehingga kalau ingin diselesaikan, maka anggarannya harus ditambah.
- c. Mohon dicatat bahwa sosialisasi di Kabupaten Bogor ditambah 1 kali lagi.

### 2. Pak Eddi, PDIP

- Kalau kita simak laporan ketua BPN, semua yang sudah dilakukan sudah bagus semua, dan apa yang menjadi daftar pertanyaan terkait dengan PTSL pada umumnya sudah terjawab. Hal seperti ini patut diapresiasi. Kemudian saya melihat beberapa poin yang perlu penekanan:
  - i. Adanya kerja sama yang baik antara Kantah BPN dengan Pemkab Bogor
  - ii. Inovasi yang sudah dikerjakan Kantah BPN Bogor sudah sangat bagus, seperti yang disampaikan Ketua, kita hanya mendorong.

iii. Tadi ada angka yang sangat mengkhawatirkan adalah ahli ukur, tambah lama tambah merosot jumlahnya, kenapa BPN tidak menambah PNS ahli ukur. Menurut PAN RB tak ada permintaan dari BPN terhadap ahli ukur. Jika tak ada peremajaan habis ahlinya

1. Terkait dengan pokmas, masih ada keluhan terhadap peran pokmas yang sudah dibentuk dari tingkat RT dan kelompok masyarakat untuk membantu BPN dalam pelaksanaan penyelesaian PTSL masih ada keluhan terjadinya pungli, antara 500 ribu – 3 jt.. di Wilayah saya di Tangsel, lurahnya ada yang ditangkap, di Tangsel dan di Kota Tangerang. Kalau bisa, peranan Bupati dalam pembinaan pokmas, perlu dipikirkan agar tidak terjadi lagi kasus pungli ini.
2. Saya meminta isteri mengurus sendiri pembuatan sertifikat, ternyata benar-benar seperti yang diceritakan oleh Kepala BPN tadi.

### 3. Pak Endro, PDIP

- a. Pertama saya mengapresiasi atas capaian dan prestasi capaian PTSL yang luar biasa. Di Dapil saya Lampung, perkabupaten hanya 15 ribu. di Kabupaten Pring Sewu, Kakantahnya sampai stroke melihat buku tanah. kami ingin mendengar strategi yang membuat capaian ini. Karena saya juga mendampingi PTSL di dapil saya.
- b. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan, apakah dukungan dari kabupaten, terkait dengan pokmas, apakah sudah ada perbup ttg PTSL. Karena jarang sekali warga mengetahui ttg SKB tiga Menteri. Kedua, apakah ditemukan warga yang mendaftar PTSL, KTPnya invalid. Berikutnya, rekapitulasi PTSL 2017

### 4. Pak Agus, FPG

- a. Melihat kantornya, menunjukkan keseriusan BPN dalam melayani masyarakat.
- b. Kami berharap informasinya jangan sampai ada data yang kurang baik, terkait jumlah penyelesaian target di 2018
- c. Seharusnya, untuk digitalisasi harus ada pengajuan ke kantor pusat agar inovasinya dapat merata ke seluruh Indonesia, sehingga peningkatan pelayanan dapat dirasakan warga.

### 5. Evi FATIMAH, PKB

- a. Ada dua hal yang ingin saya ketahui lebih jauh terkait dengan terobosan yang dilakukan oleh kantar Bogor. Ada dukungan aplikasi berbasis android dari STPN, sejauh mana terobosan ini efektif dilaksanakan. Apakah Smart PTSL ini sudah betul-betul dilakukan Kanwil untuk diterapkan di Jabar maupun di seluruh Indonesia

- b. Bagaimana selama ini respon masyarakat terhadap PTSL, di Cibonong Raya positif, sedangkan di Jasinga masih rendah, bagaimana strateginya agar ke depan warga bisa lebih menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan PTSL ini.
6. Pak Yandri, PAN
- a. Bogor ini targetnya melebihi provinsi Bengkulu dan provinsi lainnya.
  - b. Terkait dengan penataan lahan, seperti alih fungsi Kawasan di puncak Bogor yang mengakibatkan terjadinya berbagai bencana di Jabar, banjir dan longsor. Apakah ada hambatan?
  - c. Orang mengajukan sertifikat apakah diteliti betul dengan kemenhut dan tata ruangnya. Jangan sampai karena mengejar target, maka soal administrasinya cacat. Bagaimana agar kita bisa menjaga Kawasan puncak sebagai Kawasan yang indah dan
  - d. Berapa banyak alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industry maupun lahan permukiman.
7. Bu Tuti, FPDIP
- a. Dengan meningkatnya intensitas hujan, maka terjadi peningkatan kasus longsor di 10 kecamatan. Apakah ada lokasi untuk relokasi permukiman warga untuk menghindari zona rentan terhadap longsor
  - b. Sedikit mengenai sungai Cileungsi, terjadinya pencemaran sungai yang luar biasa. Karena mencemari tanah dan air tanah di Kabupaten Bogor.

## **Respon**

1. Komentar ketua Tim, Pak Herman, Demokrat
- a. Yang belum bunyi adalah soal penataruangan, meski portofolio melekat di BPN, namun di daerah tidak terjadi
  - b. Ada batas pemanfaatan wilayah hutan dan non hutan, ada 140 juta Ha yang tidak tersentuh oleh BPN. meskipun secara fungsi tetap dikelola oleh Kemenhut, namun system administrasinya harus mapan. Jangan sampai 30% mengelola Kawasan non hutan, nanti akan kesulitan ketika tupoksinya bertambah. Demikian juga dengan kasus bank tanah. masalah sewa pun harus didaftarkan ke BPN.
  - c. Bank Tanah idealnya dapat menjaga neraca ruang agar seimbang antara RTH, RTB dan Kawasan industry maupun permukiman. Harga tanah juga diupayakan tidak terjadi disparitas yang tinggi.
  - d. Konflik pertanahan diselesaikan bukan oleh orang pertanahan, sehingga setidaknya diselesaikan setidaknya pada tingkat penyelidikan. Jangan sampai kasus diselesaikan di luar pertanahan. Jangan sampai biaya pengadilan lebih rendah daripada harga tanahnya.

- e. Kami mohon dijawab secara singkat. Jika sistemnya sudah baik, maka bisa jadi prcontohan secara nasional.

2. Jawaban Kakan Bogor.

- a. Dalam data kami, jumlah 80 ribu menjadi 81 ribu, pemetaannya memang lebih 1000, ada perbedaan di 2017, ada 55 lokasi yang tersebar, sedangkan di 2018, sebagian spot2nya kecil dan bisa dilengkapi, karena kami kembali ke Cibinong raya untuk melengkapi. Di dalam proses 2019, proses sosialisasinya kami ulang lagi.
- b. Bagaimana kami bisa melaksanakan 97 ribu dan 80 ribu, karena dukungan Pemkab Bogor. Saat merencanakan wilayah, kami datang ke Pemkab untuk menyampaikan rencana kerja PTSL.
- c. Proses PTSL in, dukungna Pemkab adalah membentuk Pokmas sadar tertib pertanahan, lalu kami melakukan pelatihan lagi terhadap pokmas terpilih untuk melakukan percepatan pengukuran dan input data.
- d. Motivasi dari Kakanwil, monitoringnya setiap hari dilakukan pimpinan. Data hari ini sam adengan kemarin, akan mendapat penilaian buruk. Sehingga beberapa kantor yang besar pun tersupport
- e. Kekurangan juru ukur merupakan kekurangan utama, tetapi kami ada surveyor berlisensi. Setiap petugas ukur kami ada asisten 3 orang surveyor berlisensi. Bahwa satu saat petugas ukur menggrab bidang tanah yang telah didaftarkan oleh warga.
- f. Di NZ memiliki 1000 asisten juru ukur berlisensi yang bukan pns.
- g. Mengenai digitalisasi, merupakan antisipasi terhadap kendala penambahan SDM ada kendala faktor teknis yang tidak dapat diterima oleh warga.
- h. Mengenai peta tata ruang, kami berupaya memproses dengan MoU Bersama Bappeda.
- i. Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi II DPR RI, kebanggan ini adalah kebanggan bagi seluruh jajaran Kantah BON yang telah bekerja keras dan ikhlas. Insya Allah kami tidak ada yang sakit karena bekerja dengan ikhlas.

3. Wk Bupati

- a. Tentang Puncak, ada aturan ttg Perpres Bopunjur yang tidak berubah, namun kondisi pengendaliannya lemah.
- b. Di desa Mega Mendung, jika hujan, jalan sudah seperti aaliran sungai. Kami mohon bantuan dari pusat untuk melakukan penegakan hukum.

4. Pjs, Sekda Pemkab Bogor.

- a. Lahan Kantor BPN ini merupakan hibah dari Pemkab Bogor, mengenai pungli sebenarnya tidak ada pungutan. Tetapi ada warga yang malas mengurus soal waris, kami mengeluarkan Perbup no. 48, biayanya 150 ribu.



- b. Capaian memang karena daerah barat sangat jauh, sehingga kewajiban pemerintah untuk membuat peta rinci kepemilikan bidang tanah, seperti yang diatur pada UU PA akan sangat cepat dalam melakukan sertifikasi.
  - c. Prabu Siliwangi, ada di Kabupaten Bogor. Terkait dengan taru Puncak, Kami ada perda 11 tahun ...ada 12 peruntukan. Ada tim izin lokasi, puncak itu adalah “hukum karma”, karena 70% bangunan milik warga Jakarta.
  - d. Kerja sama sudah dilakukan dengna Kantah BPN, bahkan sebelum ada PTSL kami punya ide untuk mensertifikatkan asset pemerintah harus jadi prioritas.
  - e. Bogor ini 5,8 juta jiwa, belum termasuk di Sentul dll yang KTPnya Jakarta. Mohon cabang BPN Cigudek dan Cileungsi sangat mendesak. Pemkab pun masih ada 3000an bidang lahan. PAD Bogor Barat 200 M.
  - f. Mohon tanah2 eks HGU tidak serta merta dibagikan ke rakyat, tetapi jadi tanah komunal untuk menjaga agar lahan2 tersebut bisa tetap sesuai peruntukannya bagi kepentingan kedaulatan pangan
  - g. Perlu diklasifikasi dalam penyelesaian konflik pertanahan, di kabupaten Bogor adalah masalah dengan Rumpin AU yang melibatkan 7000 KK. Hal ini sudah pernah diajukan ke Komisi II .
  - h. Tanah negara yang ada hanya tanah Kehutanan dan perkebunan, yang tidak boleh dibangun adalah hutan lindung. Saya menawarkan agar pemerintah membeli lahan-lahan tsb.
5. Pak Herman, Demokrat
- a. Perpres 54 tahun 2008, Bopunjur, lebih baik dimasukkan saja dalam komisi II, supaya BPN dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.
  - b. Pemerintah dapat membeli lahan, kami membeli kampung mbah Marijan senilai 350 M, pemanfaatannya tetap diserahkan pada warga. Namun, Kawasan itu tidak dapat dijadikan Kawasan permukiman, mengingat potensi bahaya terhadap dampak awan panas saat Gunung Merapi Meletus.
6. Pak Yandri, FPAN, Komisi II DPR RI membentuk Pansus Kawasan Puncak, supaya penegakan hukumnya lebih tegas.
7. Kakanwil BPN Jabar
- a. Ada info yang belum disampaikan Kantah BPN Kab Bogor, yaitu upaya terkait dengan penyimpanan warkah dan buku tanah. pengadaannya berasal dari hibah pemkab Bogor, yaitu pengadaan lemari arsip robotic. Sehingga memudahkan pencarian arsip.
  - b. Dua tahun berjalan, hasil PTSIni, kami sudah mengalami kesulitan dalam hal penyimpanan warkah dan buku tanah ini. Saat ini sedang dibangun Gedung arsip

**Temuan:**

Pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya untuk menata wilayahnya dengan bekerja sama Kakan BPN Bogor sejak tahun 2007. Dukungan Pemkab Bogor sangat besar terhadap keberhasilan capaian target PTSL di Kabupaten. Sehingga Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Bupati Bogor dalam upaya mensukseskan kegiatan PTSL di wilayahnya. Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman mengenai penataan Kawasan Bopunjur sesuai dengan Perpres 54 tahun 2008, terkait dengan urgensi pembentukan Pansus agar dapat lebih efektif menyelesaikan permasalahan yang ditemui di lapangan.

**Penutup**

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bogor. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kewenangannya, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.